

Belejeti Kasus Mategal- Malang

Dewan Panggil DPMD,
Rekomendasi Tunggu LHP Inspektorat

KOTA, Jawa Pos Radar Magetan - Persoalan yang terjadi di Desa Malang dan Mategal dibeleti kalangan Komisi A DPRD Magetan. Mereka menghadirkan pihak DPMD untuk diminta keterangan terkait duduk permasalahan, penanganan hingga rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades), kemarin (16/1) »

Baca Belejeti...Hal 19

Setelah dibahas
tentang
(permasalahan) dua
desa itu, kami masih
harus menunggu
dari hasil
pemeriksaan
inspektorat."



GAGUK ARIF SUJATMIKO
Ketua Komisi A DPRD Magetan

Belejeti Kasus Mategal-Malang

Sambungan dari Hal. 16

"Setelah dibahas tentang (permasalahan) dua desa itu, kami masih harus menunggu dari hasil pemeriksaan inspektorat," kata Ketua Komisi A DPRD Magetan Gaguk Arif Sujatmiko.

Pihaknya bakal sabar menunggu inspektorat berproses. Karena memang diperlukan data pendukung baginya untuk menentukan rekomendasi menyikapi persoalan di Desa Malang dan Mategal. "Suka tidak suka, kami tetap harus berbasis dengan data (dalam mengambil keputusan). Kalau

secara mekanisme memang yang punya inspektorat, maka kami tunggu itu," ujar politisi Nasdem tersebut.

Di samping mendengarkan pendapat dari DPMD mengenai persoalan di dua desa tersebut, turut dibahas tentang rencana pelaksanaan pilkades 2025. Tahun ini setidaknya ada enam desa yang bakal menggelar pilkades. Tapi, jumlah tersebut bisa saja berkembang menjadi delapan desa ditambah Malang dan Mategal. "Persiapan sudah. Artinya, anggarannya sudah ada," terang Gaguk.

Selain itu, kata dia, pelaksana-

annya bisa menggunakan sistem e-voting maupun manual. Tergantungan kebijakan dan keputusan dari bupati terpilih nanti seperti apa. "Kami punya waktu sekitar tiga bulan untuk merencanakan itu. Kami asumsikan pilkades 2025 bisa digelar pada September," ungkapnya.

Di pihak lain, Kepala DPMD Magetan Eko Muryanto mengaku pihaknya masih menunggu laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari inspektorat terkait Desa Malang. Sedangkan kasus Desa Mategal, pihaknya masih berusaha mempelajarinya. "Sudah saya sampaikan kepada para

anggota komisi A DPRD terkait permasalahan di dua desa tersebut. Tapi, untuk yang di Desa Mategal itu sampai saat ini kami belum mengetahui secara persis permasalahannya," katanya.

Diakuinya, tidak ada persoalan administrasi yang menjerat Pemdes Mategal. Namun, ironisnya kepala desa itu justru didemo warganya. "Untuk memastikannya kami sudah berkoordinasi dengan inspektorat. Kami juga masih menunggu instruksi dari Pj bupati untuk dilakukan pemeriksaan supaya kelihatan arahnya," jelas Eko. (ril/her)